



RENCANA KERJA RENJA 2024



**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, Rencana Kerja (RENJA) Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 telah selesai disusun.

Renja ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara selama satu tahun, dengan harapan agar program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan lebih terarah dan terukur.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Renja ini disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang tinggi serta kerja keras demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Daerah serta Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara dalam peningkatan perekonomian masyarakat melalui penyelenggaraan Ketahanan pangan di Kabupaten Halmahera Utara.

Tobelo, Maret 2024

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN,**



ADITAMA ABAS, SP
PEMBINA TK.I/ IVb
NIP. 196710092006041007



Daftar Isi

	Hal.
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I. Pendahuluan	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4. Sistematika Penulisan	4
Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Renja DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun Lalu	9
II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 & Capaian Renstra	9
II.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	32
II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi	36
II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	40
II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Dari Masyarakat	41
Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	42
III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	42
III.2. Tujuan dan Sasaran Renja	46
III.3. Program dan Kegiatan	49
Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	62
Bab V. Penutup	74



NO	Daftar Tabel	Hal
1	Tabel.1. Ketersediaan Pangan Strategis	10
2	Tabel 2. Ketersedian Energi, Protein dan Lemak Berdasarkan NBM	11
3	Tabel 3. PPH (Ketersediaan)	12
4	Tabel 4. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah	12
5	Tabel 5. Gapoktan Penguatan Lembaga Distribusi) TTI – Toko Tani Indonesia	13
6	Tabel 6. Perkembangan Harga Pangan Pokok di Tingkat Enceran	14
7	Tabel 7. Pola Pangan Harapan Berdasarkan Tingkat Konsumsi	15
8	Tabel 8. Perkembangan Tingkat Konsumsi Energi	16
9	Tabel 9. Perkembangan Tingkat Konsumsi Protein	17
10	Tabel 10. Hasil Pengujian Laboratorium untuk Pangan Segar	18
11	Tabel 11. Komoditas Unggulan Yang Sudah Disertifikasi	19
12	Tabel 12. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan	48
13	Tabel 13. Indikator Kinerja Utara Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024	50
14	Tabel 14. Rencana Program Kegiatan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan	63



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan kurun waktu satu tahun yang memuat tentang Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Pagu Indikatif dan Perkiraan Anggaran. Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) ini bertujuan untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan ketahanan pangan secara menyeluruh, terpadu, ekonomis, efektif, efisien dan sinergis dengan kebijakan pembangunan jangka menengah nasional, kebijakan jangka menengah Kabupaten Halmahera Utara. Renja Dinas Ketahanan Pangan menjadi acuan, arahan kebijakan dan strategi pembangunan ketahanan pangan dalam menyusun program dan kegiatan Tahun 2024.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Renja Dinas Ketahanan Pangan mempunyai arti strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dari Visi, Misi dan Program Perangkat Daerah (PD) yang ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah (PD).
2. Renja PD merupakan acuan PD untuk memasukan program /kegiatan didalam KUA dan PPAS dan perencanaan program/ kegiatan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-PD) Tahun 2024.
3. Renja Perangkat Daerah (PD) merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Perangkat Daerah (PD) yaitu untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Mengingat arti penting strategi dokumen Renja Perangkat Daerah (PD) dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah maka tahapan penyusunan dan penetapannya berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yaitu :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu pada Perencanaan Perangkat Daerah (PD) tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan Program Prioritas sebagaimana tercantum dalam misi RPJMD.
3. Program/ kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah (PD) harus selaras dengan program/ kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program/ Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan Indikator Kinerja Keluaran (Output), Indikator Kinerja Hasil (Outcome) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 yang telah ditetapkan melalui Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;



6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
7. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ OT.46/ 10/ 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/ OT.140/ 12/ 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Indikator Kinerja Utama:
13. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 - 2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026. Lembaran Daerah Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Daerah Nomor 50;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Tambahan lembaran daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8;
16. Peraturan Bupati No.28 Tahun 2016; tentang Struktur Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara.



1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 ini adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan, yang berisikan program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan dengan dukungan pembiayaan bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Halmahera Utara, dengan harapan agar dapat mengakselerasi secara optimal segala partisipasi aktif masyarakat pada berbagai aktivitas produktif pada bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, bidang distribusi pangan, bidang penganeekaragaman pangan dan keamanan pangan. Sedangkan tujuan penyusunannya yaitu :

1. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
2. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara melalui program dan kegiatan penyelenggaraan Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Konsumsi dan Penganeekaragaman serta Keamanan Pangan;
3. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran (TA) 2024;
4. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara; dan
- 5.. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang Kabupaten;

1.4 SISTIMATIKA PENYUSUNAN

Adapun sistematika penulisan dalam dokumen Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan

(Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rencangan Renja Perangkat Daerah (PD) agar subtransi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik)



I.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RPKD, Renstra PD dengan Renja Badan Pangan Nasional dan Renja Dinas Pangan Provinsi serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD)

I.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan Ketentuan Peraturan Lainnya yang memuat tentang kewenangan Perangkat Daerah (Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara) serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan dan penganggaran Perangkat Daerah (PD).

I.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD Dinas Ketahanan Pangan Halut Tahun 2024.

I.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah (PD) Dinas Ketahanan Pangan, serta susunan garis besar isi dokumen;

Bab. II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu :

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

Bab ini memuat kajian (reviuw) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Tahun 2022 (Tahun-2) dan Perkiraan Capaian Tahun 2023 (Tahun-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra perangkat daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja perangkat daerah tahun-tahun sebelumnya.



Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra PD; dan
6. Kebijakan/ tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Bahan penulisan yang perlu disajikan dalam BAB II ini, mengacu hasil kerja (reviue hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD)

II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

II.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :



1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Halmahera Utara;
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional seperti SPM;
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan;
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda;

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini.

Bab. III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara.



III.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

III.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, serta uraian kegiatan meliputi jumlah program dan jumlah kegiatan, sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan, serta dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaanya.

Bab IV. Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V. Penutup

Bab ini berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENCANA KERJA DINAS KETAHANAN PANGAN
(RENJA DINAS KETAHANAN PANGAN) TAHUN LALU

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan

A. Kondisi Ketahanan Pangan 2023

Pembangunan Ketahanan Pangan melalui alokasi dana APBD TA. 2023 dilaksanakan melalui 4 (Empat) Program Pembangunan yaitu: (1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan; (2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; (3) Program Penanganan Kerawanan Pangan; (4) Program Pengawasan Keamanan Pangan Melalui kegiatan APBD Kabupaten Halmahera Utara

Dari keseluruhan realisasi anggaran keuangan APBD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten sebesar **Rp 2.421.630.331** dari pagu sebesar Rp. **Rp 3.492.278.322**, dengan persentase realisasi (**69,34 %**).

Berdasarkan alokasi anggaran di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara sebagian besar merupakan bantuan sosial (bansos) dan selebihnya diperuntukkan pada kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pendampingan. Adapun kegiatan utama pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut :

1. Aspek Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.

Ketersediaan pangan sebagai salah satu sub sistem ketahanan pangan yang berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanannya. Sebagai gambaran ketersediaan bahan makanan Kabupaten Halmahera dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah ini :



Tabel 1. Ketersediaan Pangan Strategis di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023.

Komoditas	Produksi (Ton)	Benih/ Pakan/ Tercecer	Ketersedian (Ton)	Total Konsumsi (Ton)	Surplus/ Minus Ketersedian (Ton)	Ketersedi aan/ Konsumsi (%)	Skor
1	2	3	4	5	6=4-5	7=4/5*100	8
Beras	37.518,5	33	17.402,41	4.952,75	12.449,66	351,36	1
Jagung	85.806	11	196,40	55.453	140.947	354	1
Kedele	0	0	0	0	0	0	4
Kc.Tanah	718,3	5	879	2.500	-1.621	35,16	3
Kc.Hijau	1.641,8	5	300	250	50	120	1
Ubi Kayu	18.238,1	10	70.890	2.453	68.437	2.787,65	1
Ubi Jalar	14,997,5	12	50.768	2.875	47.893	1.765,83	1
Buah2an	1.444,0	10	4.500	324	4.176	1.388,89	1
Sayuran	9.765,1	10	87.980	215.550	-127.570	40,82	3
Daging sapi	246.000	-	4.560	9.564	-5.004	47,67	3
Daging ayam ras & buras	1.201,89	-	32.786	23.564	9.222	139,13	1
Susu	-	-	135	80.05	54,95	168,64	1
Telur	492,57	-	20.560	25.095	-4.535	81,92	3
Ikan	1.713.301	15	1.990.650	1.526.678	463.972	130,39	1
Gula Pasir		-	3.214,55	201,5	3,0	101,49	2
Minyak Goreng		-	3.035,20	41,4	2,6	106,28	2

Keterangan : Skor 1 surplus (ratio>114%)

Skor 2 swasembada (ratio 100 -114%)

Skor 3 Cukup (ratio 95 – 100%)

Skor 4 Defisit (ratio <95%)



Dari data diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara memiliki surplus pada beberapa komoditas seperti dijelaskan dalam tabel di atas. Dan juga dapat dilihat beberapa komoditas yang mengalami defisit.

Data Neraca Bahan Makanan (NBM) menunjukkan bahwa ketersediaan bahan pangan di Kabupaten Halmahera Utara telah cukup, dicerminkan dengan ketersediaan energy dan protein yang telah melebihi standar yang ditetapkan melalui :

Tabel 2. Ketersediaan Energy, Protein dan Lemak berdasarkan NBM Kabupaten Halmahera Utara.

No	Uraian	Standar WNPg	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Energi (kal/kap/hr)	2.200	2.886	2.880	2.884	2.886	2.886
	a. Nabati		2.780	2.780	2.780	2.780	2.780
	b. Hewani		106	100	104	106	106
2	Protein (gram/kap/hr)	57	68,77	68,77	68,78	68,77	68,77
	a. Nabati		58,60	58,60	58,60	58,60	58,60
	b. Hewani		10.17	10.17	10.18	10.17	10.17
3	Lemak (gram)		50,88	48,88	48,89	50,88	50,88
	a. Nabati		35,02	35,02	35,03	35,02	35,02
	b. Hewani		15,86	13,86	13,86	15,86	15,86

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Halmahera Utara (2023)*

Ketersediaan pangan per kapita mengindikasikan rata-rata individu memperoleh bahan pangan. Total ketersediaan energi untuk dikonsumsi penduduk Kabupaten Halmahera Utara tahun 2023 mencapai 2.886 Kalori/ Kapita/ Hari.



Tabel 3. PPH (Ketersediaan) di Kabupaten Halmahera Utara (2019– 2023)

Kelompok Pangan	Skor Maks	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan				
		2019	2020	2021	2022	2023
Padi-Padian	25	25	25	25	25,00	25,00
Umbi-Umbian	2.5	2.5	1.97	2.5	2,50	2,50
Pangan Hewani	24	7.08	10.06	14.80	19,08	19,08
Minyak&Lemak	5	5.0	2.36	3.40	0,18	0,18
Buah/Biji	1	0	-	-	0,00	0,00
Berminyak	10	1.55	1.97	6.2	8,99	8,99
Kacang-Kacangan	2.5	2.5	2.5	2.5	0,00	0,00
Gula	30	30.0	30	30	30,00	30,00
Sayur & Buah	-	0	-	0	0,00	0,00
Lain-Lain	-	-	-	-	-	-
Total	100	73.63	74,40	84,44	85,75	85,75

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

Skor PPH (ketersediaan) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023 mencapai 85,75, hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Halmahera Utara belum beragam, seimbang karena belum mencapai 100.

Untuk pengembangan cadangan pangan pemerintah mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2023 dan telah dilaksanakan melalui anggaran APBD Provinsi sebanyak 800.000 ton beras yang dititipkan di gudang Bulog.

Tabel 4. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2023

Pengandaan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Beras(Ton)	1000	1000	1000	1000	1000
Total Pengandaan dari tahun 2018-2023 (Ton)				4.757,-	

Sumber Data BULOG Tobelo



2. Aspek Distribusi dan Harga Pangan.

Untuk mendukung distribusi agar pangan dapat sampai ke masyarakat perlu adanya pengembangan pola distribusi dan sarana prasarana sehingga akan terjadi distribusi pangan yang merata dan dapat menekan harga yang terjadi akibat ekonomi biaya tinggi.

Dalam rangka pemantapan distribusi pangan, Dinas Ketahanan Pangan Halmahera Utara sedang merintis penguatan Lembaga Distribusi Pangan dan program Toko Tani Indonesia melalui Gapoktan. Gapoktan ini diharapkan membuat jaringan pemasaran komoditas unggulan untuk mendukung stabilitas harga. Komoditas andalan yang diusahakan yakni kegiatan pembelian dan penyaluran beras dari sentra produksi ke pasar-pasar local yang di Kabupaten Halmahera Utara.

Tabel 5. Gapoktan Penguatan Lembaga Distribusi (Toko Tani Indonesia)

No	Tahun	Kecamatan	Desa	Nama Gapoktan
1	2023	Galela Utara	Tutumaloleo	Akebido
2	2023	Kao Barat	Makarti	Sri Rejiki
3	2023	Kao Barat	Margomulyo	Satria Tani

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Halut

Untuk panel harga tahun 2023 yang dilaksanakan di Kabupaten Halmahera Utara meliputi pasar induk dan berlangsung dari bulan Januari 2023 – Desember 2023. Persentase rata-rata pengiriman SMS panel Kabupaten Halmahera Utara untuk tingkat pedagang enceran 99 %.

➤ Harga Tingkat Enceran

Komoditas yang diamati yaitu Beras Premium, Beras Medium, Kedelai, Bawang Merah, Bawang Putih Bongol, Cabe Merah Keriting, Cabe Rawit Merah, Daging Sapi Murni, Gula Pasir Konsumsi, Daging Ayam Ras, Telur Ayam Ras, Tepung Terigu, Minyak Goreng Kemasan dan Minyak Goreng Curah, Perkembangan harga pangan strategis di tingkat enceran selama tahun 2023 (Januari-Desember) dari hasil pemantauan sebagai berikut :



Tabel 6. Perkembangan Harga Pangan Strategis Tahun 2023 di Tingkat Enceran

NO	Komoditi	Harga Rata-Rata	Standar CV	CV	Harga Min	Harga Maks
1	Beras Premium	16.000	10	0,00	15.000	17.000
2	Beras Medium	12.000	10	0,00	12.000	12.000
3	Kedelai	13.000	30	0,00	13.000	13.000
4	Bawang Merah	42.083	30	7,94	35.000	45.000
5	Bawang Putih Bongol	40.000	30	0,00	40.000	40.000
6	Cabe Merah Keriting	51.917	30	28,55	25.000	76.000
7	Cabe Rawit Merah	63.042	30	19,78	48.000	83.000
8	Daging Sapi Murni	120.833	10	2,39	120.000	130.000
9	Daging Ayam Ras	49.583	10	7,17	45.000	60.000
10	Telur Ayam Ras	27.158	10	3,77	26.000	30.000
11	Gula Pasir Konsumsi	15.333	30	4,25	14.000	16.000
12	Minyak Goreng Kemasan	24.042	30	14,03	17.500	29.000
13	Tepung Terigu	12.833	30	3,03	12.000	13.000
14	Minyak Goreng Curah	16.833	30	10,39	14.000	18.000

Dari data di atas perkembangan harga pangan pokok ditingkat pengecer pada tahun 2023 relatif stabil dengan nilai $CV \leq 10\%$ dan $CV \leq 30\%$. Namun salah satu komoditas cabe merah keriting mengalami kenaikan cukup signifikan oleh karena kurangnya ketersediaan dan meningkatnya kebutuhan masyarakat pada momen hari besar keagamaan.



3. Aspek Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

a. Pola Pangan Harapan

Pola Pangan Harapan (PPH) adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak maupun relative, yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek social, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. Dari hasil survey tingkat konsumsi pangan penduduk Halmahera Utara bahwa pola pangan harapan di Kabupaten Halmahera Utara menunjukkan kemajuan dengan komposisi konsumsi bahan pangan yang semakin mendekati berimbang pada dan dapat dilihat pada tabel 7 berikut ini :

Tabel 7. Pola Pangan Harapan berdasarkan Tingkat Konsumsi Kabupaten Halmahera Utara 2021-2023.*

No	Komponen	Standar	2021	2022	2023
1	Padi-Padian	25.0	22,0	22,0	21,0
2	Umbi-Umbian	2.5	2,2	2,0	2,0
3	Pangan Hewani	24.0	15,1	16,7	15,1
4	Minyak dan lemak	5.0	5,0	5,0	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1.0	1,0	1,0	1,0
6	Kacang-Kacangan	10.0	1,8	2,4	2,0
7	Gula	2.5	2,0	2,0	2,2
8	Sayuran & Buah	30.0	22,2	30,0	29,0
	Jumlah	100	71,4	81,2	77,3

Dari Tabel 7 dapat digambarkan bahwa PPH di Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 mengalami kecenderungan menurun. Ini menunjukkan bahwa pola konsumsi pangan masyarakat masih relatif positif mengarah beragam, bergizi, seimbang dan aman walaupun konsumsi pada beberapa komponen belum



mencapai peningkatan yang signifikan di sebabkan kondisi politik dan ekonomi global.

b. Tingkat Konsumsi (Angka Kecukupan Energi)

Tingkat konsumsi energi di Kabupaten Halmahera Utara secara umum telah mendekati standar yang ditetapkan secara nasional. Walaupun sampai tahun 2021-2023 masih di dominasi oleh asupan dari bahan pangan nabati. Tingkat konsumsi energy di Kabupaten Halmahera Utara disajikan pada tabel 8 berikut :

Tabel 8. Perkembangan Tingkat Konsumsi Kecukupan Energi di Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 – 2023.* (Kal/Kap/Tahun)

No	Kelompok Pangan	2021		2022		2023	
		Standar Ideal	Tingkat (%)	Standar Ideal	Tingkat (%)	Standar Ideal	Tingkat (%)
1	Padi-Padian	56,2	50,5	55,6	48,6	55,6	43,3
2	Umbi-Umbian	4,8	4,3	4,5	4,0	4,5	4,0
3	Pangan Hewani	8,4	7,6	9,6	8,4	9,6	8,4
4	Minyak & Lemak	15,9	14,3	13,7	12,0	13,7	12,0
5	Buah/Biji Berminyak	2,7	2,4	2,6	2,3	2,6	2,3
6	Kacang-Kacangan	1,0	0,9	1,4	1,2	1,4	1,2
7	Gula	5,0	4,5	4,8	4,2	4,8	4,2
8	Sayuran & buah	5,0	4,4	6,9	6,0	6,9	6,0
9	Lain-Lain	1,0	0,9	0,9	0,8	0,9	0,8
	Total	100	89,8	100	87,4	100	82,2



Tabel 9. Perkembangan Tingkat Konsumsi Protein di Kabupaten Halmahera Utara (gram/Kap/Hari)

No	Kelompok Pangan	2021		2022		2023	
		Standar Ideal	Tingkat (%)	Standar Ideal	Tingkat (%)	Standar Ideal	Tingkat (%)
1	Padi-Padian	47,3	42,0	43,4	40,5	43,4	40,0
2	Umbi-Umbian	1,2	1,1	1,1	1,0	1,1	1,3
3	Pangan Hewani	39,1	34,7	41,7	38,8	41,7	33,7
4	Minyak & Lemak	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	0,9	0,9	0,8	0,9	0,9
6	Kacang-Kacangan	3,7	3,3	4,0	3,7	4,0	3,3
7	Gula	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
8	Sayuran & buah	6,4	5,7	7,6	7,1	7,6	5,7
9	Lain-Lain	1,1	1,0	1,0	0,9	1,0	1,0
	Total	100	88,9	100	93,1	100	86,2



4. Aspek Mutu, Keamanan Pangan dan Sertifikasi Mutu.

Kondisi Keamanan Pangan sangat mempengaruhi kesehatan masyarakat diseluruh lapisan tanpa mengenal batas usia dan golongan ekonomi. Kondisi keamanan pangan di Kabupaten Halmahera Utara cukup dan masih berada agak sejajar dengan Standar Pelayanan Minimal. Dikarena pada tahun 2017 ini baru dimulai dengan kegiatan penanganan mutu, keamanan dan sertifikasi pangan.

Pada kondisi awal dari kegiatan di bidang Keamanan Pangan yakni dengan melakukan koordinasi, konsultasi dan sosialisasi di tingkat petani dan kelompok tentang penting aspek pentingnya Keamanan Pangan.

Dari hasil pemantauan, produk pangan segar yang dihasilkan oleh beberapa petani dan kelompok tani menunjukkan masih adanya pemakaian pupuk kimia yang tidak memenuhi standar budidaya yang baik, pemakaian pestisida dan furadan yang tidak sesuai petunjuk. Untuk hal ini maka diperlukan peran penyuluh pertanian dan petugas dari Dinas Ketahanan Pangan untuk selalu intensif dan regular mengadakan pembinaan dan penyuluhan kepada para petani dan kelompok tani.

Tabel 10. Hasil Pengujian Laboratorium untuk pangan segar di Kabupaten Halmahera Utara. Periode 2018 -2023

No	Tahun	Jumlah Sampel	Jumlah Sampel Aman	Persentase
1	2018	15	15	100 %
2	2019	19	15	78,94%
3	2020	10	8	80%
4	2021	8	8	100%
5	2022	6	3	50%
6	2023	6	6	100%

* Sumber Data Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023



Selain pengujian terhadap sampel beberapa komoditas Pertanian juga dilaksanakan sertifikasi terhadap beberapa komoditas pertanian unggulan. Dalam tahun 2023 ini program bidang ketahanan pangan masih diperuntukkan untuk memonitoring tingkat pemakaian pupuk kimia dan obat-obatan pembasmi hama dalam kegiatan usaha tani (umumnya pengawasan dilakukan pada komoditas tanamam hortikultura).

Tabel 11. Komoditas Unggulan yang sudah disertifikasi di Kabupaten Halmahera Utara, Tahun 2023.

No	Nama	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Lokasi	Komoditas
1.	Rika Ratnasari	0	1	MKCM ((Tobelo)	Kacang Panjang
2.	Weni Kulape	0	1	WKO (Tobteng)	Jagung Manis

B. Tahapan Evaluasi

Tahapan evaluasi merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses perencanaan. Tahapan evaluasi dimaksudkan untuk menilai sudah sejauh mana proses perencanaan pembangunan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan. Tahapan evaluasi juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang berdampak pada terhambatnya proses pelaksanaan rencana pembangunan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah tersebut. Hasil evaluasi tersebut, selanjutnya akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan atau langkah-langkah strategis dalam perencanaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah (PD) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, yang mempunyai tugas pokok meningkatkan ketahanan pangan masyarakat yang disesuaikan dengan kebijakan Bupati, maka salah satu indikator utama untuk menilai keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dalam melaksanakan rencana pembangunan adalah ketersediaan dokumen perencanaan sesuai ruang lingkup, jenjang dan tepat waktu. Selain itu



masih terdapat beberapa indikator kinerja lainnya, yang dipakai untuk menilai capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan tahun 2023.

Total anggaran tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 3.492.278.322,- dengan realisasi sebesar Rp 2.421.630.331,- atau 69,34 %, yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 1.046.062.091,- dengan realisasi sebesar Rp 767.289.766,- atau 73,35 % dan Belanja Langsung sebesar Rp 2.196.087.022,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.654.340.565,- atau 75,33 %. Serta Belanja Modal sebesar Rp. 24.585.900,- dengan realisasi sebesar Rp.0,- atau 0 %

Besaran rencana anggaran dan realisasi dari kegiatan tersebut diatas, dapat dilihat pada perincian sebagai berikut ini :

A. Belanja Tidak Langsung

1	Gaji dan Tunjangan	:	Rp 2.196.087.022,-
	Realisasi	:	Rp. 1.654.340.565,-
	Output	:	Terbayarnya gaji untuk 24 .orang PNS di Dinas Ketahanan pangan selama 1 tahun.
	Outcome	:	Peningkatan kesejahteraan pegawai.

2	Tambahan Penghasilan	:	Rp. 748.597.992,
	Realisasi	:	Rp. 258.692.615,-
	Output	:	Terbayarnya kinerja untuk Pejabat Struktural dan Fungsional
	Outcome	:	Peningkatan kinerja dan kesejahteraan

B. Belanja Langsung

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	:	Rp 5.147.500,-
	Realisasi	:	Rp 5.147.500,-
	Output	:	Dokumen Perencanaan telah tersusun sebanyak 2 dokumen
	Outcome	:	Teridentifikasinya Kegiatan dan program Ketahanan Pangan

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	:	Rp. 2.703.700
---	--	---	---------------



	Realisasi	:	Rp. 0,-
	Output	:	Tersedianya dokumen koordinasi dan dokumen RKA-SKPD sebanyak 2 dokumen
	Outcome	:	Terselenggaranya kegiatan koordinasi

3	Koordinas dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	:	Rp. 3.728.000,-
	Realisasi	:	Rp. 3.728.000,-
	Output	:	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
	Outcome	:	Tersedianya dukungan data capaian kinerja secara regular

4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	:	Rp. 4.850.000,-
	Realisasi	:	Rp. 2.000.000,-
	Output	:	Terlaksananya Evaluasi Kinerja selama 1 tahun
	Outcome	:	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	:	Rp. 2.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 2.000.000,-
	Output	:	Terselenggaranya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun
	Outcome	:	Laporan keuangan akhir tahun telah tersusun

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	:	Rp. 2.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 2.000.000,-



	Output	:	Terselenggaranya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan semesteran
	Outcome	:	Laporan Keuangan Semesteran telah tersusun

7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	:	Rp. 1.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 1.000.000,-
	Output	:	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
	Outcome	:	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersedia

8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	:	Rp. 1.500.000,-
	Realisasi	:	Rp. 1.500.000,-
	Output	:	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD
	Outcome	:	Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD telah tersedia

9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik Daerah pada SKPD	:	Rp. 1.500.000,-
	Realisasi	:	Rp. 1.500.000,-
	Output	:	Terselenggaranya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD
	Outcome	:	Tersedianya dokumen Rekonsiliasi BMD SKPD
10	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan	:	Rp. 2.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 2.000.000,-
	Output	:	Terselenggaranya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependudukan
	Outcome	:	Dokumen Data dan Pengolahan Administrasi Kependudukan Tersedia



11	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	:	Rp. 2.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 2.000.000,-
	Output	:	Terselenggaranya Kegiatan Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai
	Outcome	:	Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai Telah Tersedia

12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	:	Rp. 1.500.000,-
	Realisasi	:	Rp. 1.500.000,-
	Output	:	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor
	Outcome	:	Paket Penerangan Kantor terlaksana

13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp. 24.585.900,-
	Realisasi	:	Rp. 0,-
	Output	:	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 Tahun
	Outcome	:	Meningkatnya Kualitas Pekerjaan

14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	:	Rp. 3.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 2.990.000,-
	Output	:	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga selama 1 tahun
	Outcome	:	Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor

15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	:	Rp. 9.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 9.000.000,-
	Output	:	Tersedianya Bahan Logistik Kantor selama 1 Tahun



	Outcome	:	Meningkatnya Pelayanan Publik
--	---------	---	-------------------------------

15	Penyediaan Barang Cetakan & Penggandaan	:	Rp. 5.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 4.818.600,-
	Output	:	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan selama 1 tahun
	Outcome	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
16	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	:	Rp. 3.920.400,-
	Realisasi	:	Rp. 3.920.400,-
	Output	:	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Outcome	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
17	Fasilitas Kunjungan Tamu	:	Rp. 4.872.000,-
	Realisasi	:	Rp. 4.872.000,-
	Output	:	Terselenggaranya Kegiatan Fasilitas Tamu
	Outcome	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi SKPD	:	Rp. 74.998.100,-
	Realisasi	:	Rp. 13.150.000,-
	Output	:	Terselenggaranya Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD selama 1 Tahun
	Outcome	:	Peningkatan Mutu Kegiatan

19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	:	Rp. 58.200.000,-
	Realisasi	:	Rp. 27.160.000,-
	Output	:	Terbayarnya Honor Tenaga Kontrak selama 6 Bulan
	Outcome	:	Peningkatan Disiplin Jam Kerja

20	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik	:	Rp. 29.999.900,-
	Realisasi	:	Rp. 25.251.419,-



	Output	:	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah tersedia selama 1 tahun
	Outcome	:	Terciptanya Kenyamanan di Lingkungan Kantor

21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp. 0,-
	Realisasi	:	Rp. 0,-
	Output	:	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah tersedia selama 1 Tahun
	Outcome	:	Terciptanya Kenyamanan di Lingkungan Kantor

22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	:	Rp. 19.400.000,-
	Realisasi	:	Rp. 0,-
	Output	:	Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia selama 1 Tahun
	Outcome	:	Terciptanya Lingkungan Kerja yang Kondusif

22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	:	Rp. 78.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 39.000.000,-
	Output	:	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan Selama 1 Tahun
	Outcome	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan

23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasionan atau Lapangan	:	Rp. 32.056.500,-
	Realisasi	:	Rp. 20.907.547,-
	Output	:	Terbayarnya honor 1. PTT, belanja jasa servis, pergantian suku cadang, bel bahan bakar minyak & pelumas, surat tanda kendaraan (1 mobil)



	Outcome	:	Terciptanya Kenyamanan dan Keamanan kendaraan Operasional Dinas
--	---------	---	---

II. Belanja Program Peningkatan Ketahanan Pangan

1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur	:	Rp. 14.920.000,-
	Realisasi	:	Rp. 0,-
	Output	:	Tersedianya Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Infrastruktur Logistik sebanyak 1 Laporan
	Outcome	:	Mempermudah akses Infrastruktur Logistik

2	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	:	Rp. 17.782.500,-
	Realisasi	:	Rp. 17.782.500,-
	Output	:	Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan telah tersedia sebanyak 1 Dokumen
	Outcome	:	Kelancaran Distribusi Pangan

3	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	:	Rp. 7.910.000,-
	Realisasi	:	Rp. 0,-
	Output	:	Tersedianya Informasi Harga Pangan dan NBM sebanyak 2 Laporan
	Outcome	:	Informasi Harga Pangan dan NBM mudah di akses

4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	:	Rp. 11.040.000,-
	Realisasi	:	Rp. 11.040.000,-
	Output	:	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 1 laporan
	Outcome	:	Tersedianya Informasi Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan lainnya



5	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	:	Rp. 36.030.800,-
	Realisasi	:	Rp. 0,-
	Output	:	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
	Outcome	:	Tersalurnya Bantuan Alat Olahan Makanan Untuk Kelompok Tani

6	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	:	Rp. 10.665.800,-
	Realisasi	:	Rp. 5.832.900,-
	Output	:	Stok, Pasokan, dan Harga Pangan Terpantau 3 Laporan
	Outcome	:	Stabilitas Pangan Terjaga

7	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	:	Rp. 7.160.000,-
	Realisasi	:	Rp. 0,-
	Output	:	Tercapainya Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 1 unit lembaga Kelompok
	Outcome	:	Peningkatan Pendapatan Lembaga Kelompok
8	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	:	Rp. 8.499.900,-
	Realisasi	:	Rp. 0,-
	Output	:	Terselenggaranya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
	Outcome	:	Ketahanan Pangan Keluarga Meningkat

9	Koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	:	Rp. 6.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 6.000.000,-
	Output	:	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten 1 laporan
	Outcome	:	Tercapainya Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten



10	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	:	Rp. 4.999.700,-
	Realisasi	:	Rp. 4.999.700,-
	Output	:	Tersedianya Laporan Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal 1 Dokumen
	Outcome	:	Informasi Kebutuhan Pangan Lokal Mudah di Akses

11	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota	:	Rp. 86.430.000,-
	Realisasi	:	Rp. 86.430.000,-
	Output	:	Terselenggaranya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Outcome	:	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
12	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota	:	Rp. 28.373.000,-
	Realisasi	:	Rp. 0,-
	Output	:	Terselenggaranya Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
	Outcome	:	Terpeliharanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

13	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	:	Rp. 5.100.000,-
	Realisasi	:	Rp. 5.100.000,-
	Output	:	Penentuan Harga Minimum Pangan pokok Lokal disepakati 1 Laporan
	Outcome	:	Harga Pangan Pokok Lokal Terjangkau

14	Penetapan dan Penyusunan Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun	:	Rp. 19.419.800,-
	Realisasi	:	Rp. 0,-
	Output	:	Penetapan Target dan Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun tersusun
	Outcome	:	Tersedianya Data Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun



15	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	:	Rp. 411.772.100,-
	Realisasi	:	Rp. 338.400.000,-
	Output	:	Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 1 Laporan
	Outcome	:	Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Masyarakat
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita pertahun	:	Rp. 5.469.400,-
	Realisasi	:	Rp. 0,-
	Output	:	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 1 Dokumen
	Outcome	:	Tersedianya data informasi Konsumsi Per Kapita Tahun
17	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisa Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan	:	Rp. 54.455.300,-
	Realisasi	:	Rp. 0,-
	Output	:	Terlaksananya Penyusunan, Pemuthakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten 1 Laporan
	Outcome	:	Teridentifikasinya Desa Rawan Pangan
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	:	Rp. 10.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 0,-
	Output	:	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten 1 Laporan
	Outcome	:	Tersedianya data Kerawanan Pangan



19	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp. 60.409.100,-
	Realisasi	:	Rp. 0,-
	Output	:	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
	Outcome	:	Tersedianya Cadangan Pangan untuk disalurkan pada Desa Rawan Pangan Kabupaten/Kota
20	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	:	Rp. 21.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 21.000.000,-
	Output	:	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Daerah Kabupaten
	Outcome	:	Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Terjamin
21	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	:	Rp. 4.950.000,-
	Realisasi	:	Rp. 4.950.000,-
	Output	:	Terlaksananya Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten 2 Sertifikat
	Outcome	:	Pangan Segar Asal Tumbuhan aman untuk di konsumsi
22	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	:	Rp. 7.400.000,-
	Realisasi	:	Rp. 7.400.000,-
	Output	:	Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten sudah teregistrasi 2 Dokumen
	Outcome	:	Kuantitas pangan segar asal tumbuhan yang terigistrasi meningkat



23	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	:	Rp. 12.000.000,-
	Realisasi	:	Rp. 11.510.300,-
	Output	:	Terselenggaranya Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
	Outcome	:	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
24	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	:	Rp. 70.941.900,-
	Realisasi	:	Rp. 70.898.900,-
	Output	:	Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota Tersedia
	Outcome	:	Mutu dan Kualitas Pangan Segar Asal Tumbuhan dapat Terjaga

Uraian di atas hanya menggambarkan hasil capaian pelaksanaan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan pada Tahun Anggaran 2024. Sementara itu sesuai dengan lampiran VI Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, mewajibkan bahwa pada bagian ini harus digambarkan capaian pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari tiga tahun terakhir (n-3), dimana n adalah tahun perencanaan, dua tahun terakhir dan target capaian rencana kerja pada satu tahun terakhir. Terkait dengan hal tersebut, maka uraian capaian pelaksanaan rencana kerja Dinas Ketahanan Pangan akan digambarkan sejak tahun 2023, tahun 2024 dan perkiraan capaian pada tahun 2025



II.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan menangani satu Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yaitu Urusan Pangan. Dalam kaitan dengan hal tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan berkewajiban memenuhi target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Adapun Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diamanatkan dalam Peraturan Permetan No: 65/ Permentan / OT.140/ 12/ 2010 adalah sebagai berikut :

Empat (4) Jenis Pelayanan Dasar

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan
 - a. Ketersediaan Energy dan Protein Perkapita
 - b. Penguatan Cadangan Pangan
2. Distribusi dan Akses Pangan
 - a. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah
 - b. Stabilitas harga dan pasokan pangan
3. Penganekaragaman dan Keamanan pangan
 - a. Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
 - b. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan
 - a. Penanganan daerah rawan Pangan

Untuk Penjabaran Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2023 dalam :

- Bidang ketersediaan dan cadangan pangan meliputi :
 - a. Peningkatan Ketersediangan Pangan Masyarakat
 - b. Pencapaaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Acuan dalam menganalisis Kinerja Pelayanan SKPD harus berdasarkan pada indikator kinerja, atau berdasarkan SPM (jika SKPD bersangkutan memiliki SPM) untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan/atau berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 6 Tahun 2008. Dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan (Renstra DKP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021 – 2026, telah dituangkan pada Bab II tentang Pengukuran Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Halmahera Utara, yang didasarkan pada analisis kebutuhan pelayanan sesuai



tugas pokok dan fungsi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara. Adapun kinerja pelayanan yang harus dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara dalam periode lima tahun, adalah sebagai berikut :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur
2. Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan;
3. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan;
4. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
5. Koordinasi, dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya;
6. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan;
7. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan;
8. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia;
9. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota;
10. Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal;
11. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
12. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ kota;
13. Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal;
14. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun;
15. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun;
17. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten;
18. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota;



19. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
20. Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Kabupaten;
21. Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten;
22. Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten;
23. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Wilayah Kecamatan;
24. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Berdasarkan kinerja pelayanan yang harus dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam periode lima tahun, sebagai mana telah diuraikan di atas, maka perkiraan tantangan yang akan dihadapi adalah sebagai berikut :

1. DINAS KETAHANAN PANGAN Kabupaten Halmahera Utara harus dapat mensinkronkan kebijakan serta rencana program dan kegiatan antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan juga dengan Badan Pangan Nasional dan Lembaga Pemerintah Pusat, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program.
2. Pengumpulan data awal untuk baseline data masih memerlukan waktu untuk bisa ditampilkan secara baik dan benar;
3. Implementasi kegiatan/program dirasakan masih menemui kendala karena faktor aparatur yang belum memadai secara basic dan peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan kegiatan dalam bidang ketahanan pangan masih dalam tahap mempelajari aturan dan kebijakan serta program-program yang akan dilaksanakan secara berkelanjutan.
4. Keterlambatan waktu dalam pelaporan hasil kegiatan, monitoring dan evaluasi sehingga akan mempengaruhi laporan kinerja akhir.
5. Masih terbatasnya sumberdaya aparatur Ketahanan Pangan dalam hal pengumpulan informasi, pengolahan data dan analisis data terlebih khusus dalam bidang ketahanan Pangan.

Sementara itu, selain tantangan dalam pencapaian standar kinerja pelayanan sebagaimana telah diuraikan di atas, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Halmahera Utara, juga memiliki peluang-peluang untuk dapat



mencapai standar kinerja pelayanan tersebut, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Tersedianya sejumlah anggaran yang dialokasikan setiap tahunnya untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Halmahera Utara. Walaupun tidak cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan, termasuk mengakomodir kebutuhan masyarakat, akan tetapi Dinas Ketahanan Pangan diharapkan dapat memprioritaskan program dan kegiatan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
2. Tersediaanya sumber daya aparatur yang ada saat ini dapat dimaksimalkan, melalui pelatihan dan pendidikan atau bimbingan teknis, agar kendala-kendala pelayanan dapat tertangani dengan baik.
3. Ketersediaan sarana dan prasarana yang terus meningkat dari tahun ke tahun, dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga dapat membantu berbagai pelayanan yang akan dilaksanakan.
4. Dukungan dari pihak terkait (Instansi Teknik) dalam hal kerjasama untuk memprioritaskan program-program ketahanan pangan baik implementasi program maupun pelaksanaan program di tingkat lapangan.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program & kegiatan, sebagaimana tertuang di dalam Tabel II.1 serta hasil evaluasi kinerja pelayanan sebagaimana yang tertuang di dalam Tabel II.2, maka analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara, dalam kurun waktu tiga tahun (2021-2023) adalah sebagai berikut :

Ada 44 (empat puluh empat) kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 - 2026.

Berdasarkan paparan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masih perlunya kerja keras dari seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Halmahera Utara untuk memperbaiki & meningkatkan kinerja pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka Capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Halmahera Utara.

II.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Dinas Ketahanan Pangan

Pelaksanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara sangat dipengaruhi oleh kondisi factor internal dan factor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas mempunyai peran besar terhadap keberhasilan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Halmahera Utara. Sumber daya yang ada dan tersedia harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Halmahera utara :

- a) Perumusan kebijakan teknis di Dinas Ketahanan Pangan:
 - o Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan nasional, provinsi dan kabupaten;
 - o Kurang optimalnya Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi PD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan
- b) Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum di bidang Ketahanan Pangan.
 - o Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan;
 - o Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang Ketahanan Pangan
 - o Masih terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakan;
 - o Masih kurangnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan.
 - o Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan dan keamanan pangan lingkup kabupaten Halmahera Utara.
 - o Ketersediaan pangan antar waktu antar wilayah tidak merata;

- Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa);
- Belum memadainya sarana dan prasaran distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;
- Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;
- Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis impor
- Masih terjadinya kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi;
- Pemantauan, evaluasi dan Pelaporan bidang Ketahanan Pangan
- Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
- Belum optimalnya koordinasi internal dan unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggungjawabnya;
- Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan balik (feed back) bagi perbaikan pelaksanaan perumusan perencanaan di masa mendatang;

Berbagai permasalahan pembangunan Ketahanan Pangan yang dihadapi, tantangan dan potensi dapat dikembangkan untuk mendasari perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan. Perumusan dilaksanakan dengan mempertimbangkan pengaruh terhadap pencapaian sasaran pembangunan Ketahanan Pangan di Kabupaten Halmahera Utara. Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian;

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan pedesaan yang kehidupannya tergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan, belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan



yang ada. Oleh karena itu pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

2. Penanganan Kerawanan Pangan

Potensi kerawanan pangan di Halmahera Utara masih ada, hal ini diakibatkan, kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah daerah. Penanganan kerawanan pangan dilakukan dengan memasukkan perbedaan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesejangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses kegiatan penanganan rawan pangan baik berupa kegiatan pemberdayaan untuk mengurangi potensi kerawanan pangan maupun kegiatan intervensi penanggulangan kerawanan pangan dan gizi.

3. Peningkatan Stabilitas Pasokan Harga dan Distribusi Pangan

Stabilitas pasokan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut, waktu tempuh, pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan



rusak semakin banyak sehingga mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. Peningkatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Masyarakat.

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak lepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industry pangan siap saji yang berbasis impor. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat dilaksanakan dengan tidak membedakan jenis kelamin dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai dengan wilayahnya.

5. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Segar.

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar dimasyarakat ditujukan dengan masih terjadinya kasus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologis, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol peredaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

Untuk menyelesaikan permasalahan pokok atau isu-isu strategis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Dinas Ketahanan Pangan



Kabupaten Halmahera Utara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8, 9 dan 10 Tahun 2017, harus berbenah dan bekerja keras serta mempergunakan seluruh sumberdaya yang ada dalam rangka menuntaskan isu-isu strategis tersebut.

II.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, mengamanatkan bahwa penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) haruslah mengacu kepada Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada tahun perencanaan. Dengan demikian dalam penyusunan Renja Dinas Ketahanan Pangan (DKP) haruslah mengacu pada beberapa hal sebagai berikut :

- ❖ Penetapan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan haruslah mengacu pada program prioritas, arah kebijakan pembangunan serta tujuan dan sasaran pembangunan yang digariskan di dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.
- ❖ Penganggaran program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan haruslah mengacu pada arah kebijakan keuangan daerah, yang secara lebih spesifik ditetapkan rencana program dan kegiatan prioritas daerah, yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.

Oleh karena prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan serta tujuan dan sasaran pembangunan yang termuat di dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 masih bersifat umum, maka isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Halmahera Utara, sebagaimana telah diuraikan pada bagian II.3 diatas, akan menjadi sandaran lainnya bagi Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dalam merancang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dengan harapan mampu menjawab dan menyelesaikan isu-isu strategis tersebut.

Selanjutnya rencana program dan 44 kegiatan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) yang tertuang dalam Rancangan Awal RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024, akan direview dan dianalisis untuk mendapatkan rencana program dan kegiatan baru yang sinkron dengan tahapan perencanaan sebagaimana telah



disinggung diatas. Selengkapnya hasil review program dan kegiatan pada Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.

II.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Masukan yang disampaikan oleh masyarakat lewat kegiatan Musrembang tingkat Kecamatan yang ditujukan kepada Dinas ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara dalam Tahun 2023 untuk pelaksanaan Renja 2024 tidak ada usulan yang disampaikan ke Dinas Ketahanan Pangan, namun program Dinas dalam bentuk kegiatan seperti KRPL dan kegiatan sejenisnya akan selalu dilaksanakan di tingkat desa dan kecamatan.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pada lingkup Perangkat Daerah (PD) dokumen perencanaan lima tahunan berupa dokumen Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara maka disusunlah Rencana Strategik Dinas Ketahanan Pangan 2021 – 2026 yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang terdapat beberapa dokumen perencanaan nasional dan daerah yang menjadi dasar bagi perencanaan kinerja. Beberapa dokumen tersebut adalah Rencana Pembangunan Nasional dan daerah berupa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah memuat arah, kebijakan dan strategi serta program-program pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara maupun mendorong peran serta aktif masyarakat.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Halmahera Utara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program pembangunan ketahanan pangan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu 2021 – 2026 dengan penekanan pada pencapaian Sasaran Prioritas Nasional, Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Renstra Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Halmahera Utara ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, Indikator yang akan dicapai sampai tahun 2024.

- Visi

Visi adalah kondisi yang dicita-citakan untuk diwujudkan. Secara ontologisme, visi merupakan das sollen, yaitu apa yang sebenarnya menjadi tujuan atau keinginan yang ideal yang disepakati oleh seluruh stakeholders dan terkristalisasi dalam bentuk jati diri. Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus



sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Masyarakat Halmahera Utara berkehendak menjadikan visi pembangunan sebagai inspirasi, peta jalan atau langkah strategic, energy masyarakat untuk pembangunan dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komperatif ataupun secara kompetitif. Visi Ketahanan Pangan di Kabupaten Halmahera Utara ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Kabupaten Halmahera Utara yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholder) di Kabupaten Halmahera Utara dalam periode (2021 – 2026).

Hal-Hal penting memasuki tahapan awal dari RPJPD Kabupaten Halmahera Utara adalah :

1. Mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan pemerataan kualitas dan kesejahteraan antar wilayah; Dinamika ekonomi yang atraktif dimantapkan dengan memperluas jangkuan jaringan kerja kegiatan ekonomi dalam skala Nasional dan Internasional.
2. Pengembangan, pemanfaatan dan peneerapan lptek serta Penguatan pada upaya optimalisasi pendayagunaan potensi sumber daya dan infrastruktur.

Oleh karena pentingnya sekali menjadikan visi pembangunan Kabupaten Halmahera Utara menjadi visi bersama (shared vision). Dengan mendasarkan modal dasar Kabupaten Halmahera Utara maka Visi Kabupaten Halmahera Utara yakni :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara melalui Pembangunan Berkelanjutan dengan Inovasi dan Investasi Dalam Kebersamaan yang Berkeadilan.”

Makna kata yang terkandung dalam Visi tersebut, diuraikan sebagai berikut:

Kesejahteraan Masyarakat: kesejahteraan dapat merupakan sesuatu yang bersifat subjektif, yang ukurannya dapat berbeda bagi perspektif setiap individu atau keluarga, maupun komunitas. Akan tetapi pada prinsipnya konteks kesejahteraan masyarakat berkaitan erat dengan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Dalam Pengertian yang lebih luas, hakikat kesejahteraan masyarakat ialah kondisi di mana terbebasnya masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dari jeratan kemiskinan,



kebodohan, dan rasa takut sehingga mampu memperoleh kehidupan yang aman, damai dan tenteram secara lahiriah maupun bathiniah berlanaskan nilai-nilai luhur agama, Pancasila dan kearifan lokal.

Pembangunan Berkelanjutan: merupakan proses pembangunan daerah yang memaksimalkan sumber daya alam yang tersedia dan diolah sebagai penanda Kabupaten Halmahera Utara yang sedang bergerak maju, baik secara struktur sosial, ekonomi, maupun politik. Pemabangunan Kabupaten Halmahera Utara yang berkelanjutan akan menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Inovasi: Pembangunan merupakan proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Adapun inovasi namun secara umum inovasi dapat berupa ide, cara-cara ataupun objek yang dipersepsikan sebagai sesuatu yang baru. Inovasi juga dapat merujuk pada perubahan yang dirasakan sebagai hal yang baru oleh masyarakat yang mengalami. Dalam konteks ini, inovasi pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara merupakan suatu komitmen Pemerintah Daerah untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya secara terencana dengan memperbaiki, memperbaharui, meningkatkan, dan mengembangkan proses-proses dan model pengelolaan paling optimal dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan.

Investasi: Pembangunan daerah dan pembangunan sektoral perlu selalu dilaksanakan dengan selaras, sehingga pembangunan sektoral yang berlangsung di daerah, benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah pada hakikatnya dilaksanakan agar ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar daerah tidak semakin meluas. Pembangunan daerah diarahkan untuk mencapai tiga tujuan penting yaitu mencapai pertumbuhan (*growth*), pemerataan (*equity*), dan keberlanjutan (*sustainability*).

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka ditetapkan misi yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa



misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Ada 4 (empat) Misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

1. Memperkuat pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk termasuk pemajuan pendidikan karakter dan kebudayaan daerah;
2. Mengurangi kesenjangan wilayah dan memperkuat daya saing daerah melalui pengembangan infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar serta optimalisasi pengelolaan ruang wilayah dan lingkungan hidup;
3. Membangun perekonomian daerah yang kokoh dan berdaya saing melalui investasi produktif berkelanjutan pada sektor pertanian, perikanan kelautan dan pariwisata serta penumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi;
4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui inovasi dan transformasi proses bisnis berkelanjutan.

Hasil identifikasi Dinas Ketahanan Pangan tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih akan menjadi input bagi perumusan strategi pelayanan Dinas Ketahanan Pangan. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan pada kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor penghambat dan pendorong agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Ditinjau dari sisi tugas urusan pangan, secara umum tugas Dinas Ketahanan Pangan terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Bupati dan Wakil Bupati, namun secara khusus tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian Misi III yaitu: ***“Membangun Perekonomian Daerah Yang Kokoh Dan Berdaya Saing Melalui Investasi Produktif Berkelanjutan Pada Sektor Pertanian, Perikanan Kelautan Dan Pariwisata Serta Penumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi”*** dalam mewujudkan Tujuan Daerah ke 3 yaitu “Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang



Berkualitas, Transformatif, dan inklusif berbasis inovasi dan kreatifitas” dengan indikator kinerja “*Laju Pertumbuhan Ekonomi; Pendapatan per Kapita; dan Indeks Rasio Gini*” serta Sasaran Daerah ke 6 yaitu “Meningkatnya Ketahanan Ekonomi Masyarakat serta Efektifitas Pengentasan Melalui Usaha-Usaha Ekonomi Produktif dan Kreatif” dengan indikator kinerja “*Indeks Ketahanan Ekonomi; Tingkat Kemiskinan*”. Sasaran Daerah ke 6 ini yang kemudian dijabarkan/diturunkan (*cascade*) ke Sasaran Strategis Dinas Ketahanan Pangan yaitu “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat” yang kemudian diukur dengan 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan yaitu “*Skor Pola Pangan Harapan/ PPH*) ”

III.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2021-2026. Peran Dinas Ketahanan Pangan dalam memberikan kontribusi dalam pencapaian visi misi daerah adalah penyusunan dokumen perencanaan daerah yang berkualitas dan mengawal integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan RKPD dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan yang dituangkan dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Visi didefinisikan sebagai rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada suatu akhir periode perencanaan. Visi merupakan suatu nilai yang inspiratif bagi suatu organisasi (*organization values*). Sedangkan misi merupakan instrumen bagi organisasi dalam pencapaian visi. Dari hasil telaah mengenai permasalahan dan isu strategis, maka diturunkan pada Penetapan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan, dalam hal ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada penciptaan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis dan analisa strategis, yang mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.



Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata, terukur dan diupayakan untuk dicapai dalam kurun waktu tertentu/ tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perumusan tujuan dan sasaran pelayanan Dinas Ketahanan Pangan untuk jangka menengah (2021-2026) dijabarkan menurut tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan yang diarahkan untuk mendukung visi dan misi yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021-2026, yaitu :

Tujuan 1 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat

Indikator : Skor Pola Pangan Harapan/PPH.

Tujuan 2 : Mewujudkan Pengelolaan Manajemen Perkantoran yang Baik dan Bersih

Indikator : Nilai Sakip

Sasaran 1 : Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat

Indikator : Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat

Sasaran 2 : Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran Yang Berkualitas dan Akuntabel

Indikator : Nilai Sakip

Kerangka logis perencanaan integratif yang mengkonsolidasikan sub-sub sasaran dari peran berbagai urusan pemerintahan daerah untuk pencapaian sasaran-sasaran pokok dalam Tujuan-3.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada tabel 12 berikut :



Tabel 12. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				I	II	III	IV	V	VI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat		Persentase Ketersediaan Pangan Masyarakat	80	85	86	87	88	89
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	84,57	84,82	85,20	86,36	87,13	87,13
2.	Mewujudkan Pengelolaan Manajemen Perkantoran yang Baik dan Bersih	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran Yang Berkualitas dan Akuntabel	Nilai Sakip	B	B	B	B	B	B



III.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana diuraikan diatas maka diperlukan rumusan program/kegiatan. Dalam merumuskan program/kegiatan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 ada beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya antara lain:

1. Mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui penyusunan rencana pembangunan yang tepat sasaran secara terinci dan sistematis;
2. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan, serta infrastruktur dalam kerangka RPJPD Kabupaten Halmahera Utara;
4. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program/kegiatan;
5. Adanya sumber-sumber pendanaan yang menunjang untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan pembangunan.

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 merupakan program/ kegiatan/ sub kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam kerangka perumusan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Utara.
2. Jumlah program yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, sesuai nomenklatur Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 adalah sebanyak 5 (Lima) program yang terdiri dari 1 (satu) Program Penunjang pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara dan 4 (empat) Program Urusan Pangan.
3. Jumlah kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai pemetaan nomenklatur program dan kegiatan ke dalam program, kegiatan, dan sub

kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah sebanyak 15 (lima belas) kegiatan yang terdiri atas 7 (tujuh) kegiatan penunjang/rutin dan 8 (delapan) kegiatan urusan pangan.

4. Jumlah sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai pemetaan nomenklatur program dan kegiatan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) yang terdiri dari 27 (dua puluh enam) sub kegiatan rutin pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara dan 19 (dua puluh empat) sub kegiatan urusan pangan.
5. Jumlah kebutuhan dana/ pagu indikatif dalam mendukung pelaksanaan program/ kegiatan/ sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 3.337.825.383,00 (Tiga Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Halmahera Utara.

Adapun target Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 dijabarkan pada tabel 13 berikut :

Tabel 13. Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan	86,36 %
		Presentase Peningkatan Ketersediaan Pangan	87 %
2	Terwujudnya Tata Kelola Manajemen Perkantoran Yang Berkualitas dan Akuntabel	NILAI SAKIP	B

Untuk mendukung prioritas pembangunan peningkatan kualitas dokumen perencanaan dan peningkatan profesionalisme Pembangunan Daerah, maka program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

**A. Belanja Tidak Langsung**

1	Gaji dan Tunjangan	:	Rp. 2.587.588.631
	Output & Target Capaian	:	Terbayarnya gaji dan tunjangan untuk 23 orang PNS di DINAS KETAHANAN PANGAN selama 1 tahun
	Outcome	:	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

B. Belanja Langsung**1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	:	Rp. 5.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Dokumen Perencanaan telah tersusun sebanyak 2 dokumen
	Outcome	:	Teridentifikasinya Kegiatan dan program Ketahanan Pangan

2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	:	Rp. 2.500.000,-
	Output & Target Capaian	:	Tersedianya dokumen koordinasi dan dokumen RKA-SKPD sebanyak 1 dokumen
	Outcome	:	Terselenggaranya kegiatan koordinasi

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	:	Rp. 3.500.000,-
	Output & Target Capaian	:	Tersedianya Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah (DINAS KETAHANAN PANGAN) sebanyak 1 Dokumen
	Outcome	:	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur DINAS KETAHANAN PANGAN

4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	:	Rp. 4.500.000,-
	Output & Target Capaian	:	Terlaksananya Evaluasi Kinerja selama 1 tahun sebanyak 1 Dokumen
	Outcome	:	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

**2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	:	Rp.2.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Terselenggaranya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 Laporan
	Outcome	:	Laporan keuangan akhir tahun telah tersusun

6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	:	Rp.2.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Terselenggaranya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan semesteran sebanyak 2 Laporan
	Outcome	:	Laporan Keuangan Semesteran telah tersusun

7	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	:	Rp.2.000.000 ,-
	Output & Target Capaian	:	Tersusunnya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebanyak 1 Dokumen
	Outcome	:	Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran tersedia

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

8	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	:	Rp. 1.500.000,-
	Output & Target Capaian	:	Tersusunnya Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD sebanyak 1 Dokumen
	Outcome	:	Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD SKPD telah tersedia

9	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	:	Rp. 1.500.000,-
	Output & Target Capaian	:	Terselenggaranya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD SKPD sebanyak 1 Laporan
	Outcome	:	Tersedianya dokumen Rekonsiliasi

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

10	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	:	Rp. 39.050.000,-
	Output & Target Capaian	:	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya sebanyak 52 OP
	Outcome	:	Tersedianya Data Administrasi Kepegawaian

11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	:	Rp. 2.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 1 Dokumen
	Outcome	:	Tersedianya Data Administrasi Kepegawaian

12	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	:	Rp. 2.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sebanyak 1 Dokumen
	Outcome	:	Dokumen Monev dan Penilaian Kinerja Pegawai Tersedia

	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	:	Rp. 0,-
	Output & Target Capaian	:	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Outcome	:	Tersedianya Kapasitas SDM dalam menjalankan Tupoksinya

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

13	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	:	Rp.1.500.000 ,-
	Output & Target Capaian	:	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Bangunan Kantor sebanyak 1 Paket
	Outcome	:	Paket Penerangan Kantor terlaksana



	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp. 0,-
	Output & Target Capaian	:	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Outcome	:	Meningkatnya Kualitas Pekerjaan

14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	:	Rp. 2.500.000,-
	Output & Target Capaian	:	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga sebanyak 3 Paket
	Outcome	:	Terpeliharanya Kebersihan Lingkungan Kantor

15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	:	Rp. 9.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Tersedianya Bahan Logistik Kantor sebanyak 1 Paket
	Outcome	:	Meningkatnya Pelayanan Publik

16	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	:	Rp. 4.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan sebanyak 1 Paket
	Outcome	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	:	Rp. 0,-
	Output & Target Capaian	:	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	Outcome	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

17	Fasilitasi Kunjungan Tamu	:	Rp. 4.689.400,-
	Output & Target Capaian	:	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu sebanyak 1 Laporan
	Outcome	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

18	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	:	Rp. 68.209.600,-
	Output & Target Capaian	:	Terseleenggaranya Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 23 Laporan
	Outcome	:	Peningkatan Mutu Kegiatan

**6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	:	Rp. 34.920.000,-
	Output & Target Capaian	:	Terlaksanannya Distribusi Surat Menyurat (1 Laporan)
	Outcome	:	Dokumen Surat Keluar Masuk Terdokumentasi dengan baik

20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	:	Rp. 34.980.000,-
	Output & Target Capaian	:	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik telah tersedia sebanyak 12 Laporan
	Outcome	:	Terciptanya Kenyamanan di Lingkungan Kantor

21	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	:	Rp. 1.294.700,-
	Output & Target Capaian	:	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor telah tersedia sebanyak 1 Laporan
	Outcome	:	Terciptanya Kenyamanan di Lingkungan Kantor

22	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	:	Rp. 11.640.000,-
	Output & Target Capaian	:	Jasa Pelayanan Umum Kantor tersedia sebanyak 1 OK (1 Laporan)
	Outcome	:	Terbayarkannya Honor PTT

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

23	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	:	Rp. 78.000.000,-
	Output& Target Capaian	:	Tersedianya Anggaran Sewa Kendaraan Dinas Jabatan Selama 1 Tahun sebanyak 1 Unit
	Outcome	:	Meningkatnya Kualitas Pelayanan



24	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	:	Rp. 25,261.600,-
	Output & Target Capaian	:	Terbayarnya honor 1. PTT, belanja jasa servis, pergantian suku cadang, bel bahan bakar minyak & pelumas, sebanyak (1 Unit)
	Outcome	:	Terciptanya Kenyamanan dan Keamanan kendaraan Operasional Dinas

8. Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah

	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	:	Rp. 0,-
	Output & Target Capaian	:	Tersedianya Laporan Koordinasi dan sinkronisasi Infrastruktur Logistik
	Outcome	:	Mempermudah akses Infrastruktur Logistik

	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	:	Rp. 25.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya tersedia sebanyak 1 Unit Kelompok Tani
	Outcome	:	Kelancaran Distribusi Pangan

9. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.

26	Penyusunan Neraca Bahan Makanan	:	Rp. 10.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Tersedianya Informasi NBM sebanyak 1 Dokumen
	Outcome	:	Informasi NBM mudah di akses

27	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	:	Rp. 36.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Terselenggaranya Gelaran Pangan Murah sebanyak 1 Laporan



	Outcome	:	Stabilitas Kenaikan Pangan Terjaga
--	---------	---	------------------------------------

28	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Pangan Lainnya	:	Rp. 5.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sebanyak 1 Laporan
	Outcome	:	Tersedianya Data dan Laporan Desa dalam rangka Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya

29	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	:	Rp. 5.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan, dan Harga Pangan Terpantau 1 Laporan
	Outcome	:	Stabilitas Pangan Terjaga

	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	:	Rp. 0,-
	Output & Target Capaian	:	Tercapainya Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan
	Outcome	:	Peningkatan Pendapatan Lembaga Kelompok

	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	:	Rp. 0,-
	Output & Target Capaian	:	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga
	Outcome	:	Ketahanan Pangan Keluarga dapat tercapai

**10. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten**

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	:	Rp. 0,-
	Output & Target Capaian	:	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten
	Outcome	:	Tercapainya Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten

30	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	:	Rp. 5.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal sebanyak 1 Dokumen
	Outcome	:	Tersedianya Dokumen Kebutuhan Pangan Lokal

31	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota	:	Rp. 51.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Terseleggaranya Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebanyak 5 Ton
	Outcome	:	Cadangan Pangan Beras Pemerintah Kabupaten Tersedia

32	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota	:	Rp. 5.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Tersalurnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebanyak 5 Ton
	Outcome	:	Terpenuhinya Kebutuhan Masyarakat yang terkena dampak Bencana

11. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi/ Pusat.

33	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	:	Rp. 4.055.452,-
	Output & Target Capaian	:	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal Sebanyak 1 Laporan
	Outcome	:	Harga Pangan Pokok Lokal Terjangkau

**12. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi.**

34	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	:	Rp. 25.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Sebanyak 1 Dokumen
	Outcome	:	Tersedianya Data Konsumsi Pangan Perkapita per Tahun

35	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	:	Rp. 50.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Sebanyak 1 Laporan
	Outcome	:	Terpenuhinya Kebutuhan Gizi Masyarakat

36	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	:	Rp. 5.500.000,-
	Output& Target Capaian	:	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 1 Laporan
	Outcome	:	Tersedianya data informasi Konsumsi Per Kapita Pertahun

13. Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kewenangan Kabupaten

37	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten	:	Rp. 45.000.000,-
	Output & Target Capaian	:	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 1 Dokumen
	Outcome	:	Peta Desa Rawan Pangan Tersedia

14. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota

38	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	:	Rp. 8.000.000,-
	Output& Target Capaian	:	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten 1 Laporan
	Outcome	:	Tersedianya data desa Kerawanan Pangan

39	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp. 46.260.000,-
	Output & Target Capaian	:	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sebanyak 1 Dokumen
	Outcome	:	Tertanganinya Desa Rawan Pangan

15. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Wilayah Kabupaten

	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	:	Rp. 0,-
	Output & Target Capaian	:	Menguatnya Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
	Outcome	:	Tersedianya Lembaga Keamanan Pangan Segar Daerah yang profesional

40	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	:	Rp. 16.790.000,-
	Output& Target Capaian	:	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan sebanyak 2 Laporan
	Outcome	:	Pangan Segar Asal Tumbuhan aman untuk di konsumsi



42	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	:	Rp. 11.280.000,-
	Output & Target Capaian	:	Perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten terekomendasi sebanyak 2 Dokumen
	Outcome	:	Kuantitas pangan segar asal tumbuhan yang terregistrasi meningkat

43	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Wilayah Kecamatan	:	Rp. 11.280.000,-
	Output & Target Capaian	:	Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten sudah terekomendasi 2 Dokumen
	Outcome	:	Jumlah pangan segar asal tumbuhan yang terekomendasi meningkat

44	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	:	Rp. 41.526.000,-
	Output & Target Capaian	:	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen
	Outcome	:	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Artinya program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan Masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Renja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024 yang terdiri dari program pembangunan yang direncanakan sebanyak 4 (Empat) Program dan Kegiatan.



Tabel 14

Rencana Program Kegiatan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan

RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KETAHANAN PANGAN

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2024				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA 2025	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN								
2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah	KETPAN	90%	2.931.133.931	DAU		90%	3.392.505.147
2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Konsistensi Perencanaan Perangkat Daerah	KETPAN	85%	15.500.000	DAU		85%	22.500.000
2.09.01.2.01. 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang tersedia	KETPAN	2 Dok	5.000.000	DAU		2 Dok	7.500.000



2.09.01.2.01. 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	KETPAN	1 Dok	2.500.000	DAU		1 Dok	5.000.000
2.09.01.2.01. 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA SKPD	KETPAN	-	-	DAU		-	-
2.09.01.2.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA- SKPD	KETPAN	-	-	DAU		-	-
2.09.01.2.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Peerubahan DPA- SKPD	KETPAN	-	-	DAU		-	-
2.09.01.2.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisari Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen laporan kinerja dan ikhtisari realisasi kinerja (dokumen)	KETPAN	1 Dok	3.500.000	DAU		1 Dok	5.000.000
2.09.01.2.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan kinerja Perangkat Daerah	KETPAN	1 Dok	4.500.000	DAU		1 Dok	5.000.000
2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah	KETPAN	100%	2.593.588.631	DAU		100%	2.786.104.967
2.09.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	KETPAN	23 OB	2.587.588.631	DAU		23 OB	2.771.104.967



2.09.01.2.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	KETPAN	1 Lap	2.000.000	DAU		1 Lap	5.000.000
2.09.01.2.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	KETPAN	1 Lap	2.000.000	DAU		1 Lap	5.000.000
2.09.01.2.02. 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	KETPAN	1 Dok.	2.000.000	DAU		1 Dok.	5.000.000
2.09.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pengadaan BMD pada perangkat Daerah	KETPAN	100%	3.000.000	DAU		100%	3.150.000
2.09.01.2.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	KETPAN	1 Dok.	1.500.000	DAU		1 Dok.	1.575.000
2.09.01.2.03. 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	KETPAN	1 Lap	1.500.000	DAU		1 Lap	1.575.000
2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Adminnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	KETPAN	100%	43.050.000	DAU		100%	108.531.300
2.09.01.2.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	KETPAN	52 OP	39.050.000	DAU		29 OP	25.760.000



2.09.01.2.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	KETPAN	1 Dok.	2.000.000	DAU		1 Dok.	5.000.000
2.09.01.2.05. 05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	KETPAN	1 Dok.	2.000.000	DAU		1 Dok.	5.000.000
2.09.01.2.05. 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	KETPAN			DAU		4 Ok	72.771.300
2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	KETPAN	100%	89.899.000	DAU		100%	242.865.200
2.09.01.2.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	KETPAN	1 Paket	1.500.000	DAU		1 Paket	1.575.000
2.09.01.2.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KETPAN			DAU		4 Paket	21.000.000
2.09.01.2.06. 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	KETPAN	3 Paket (12 Bln)	2.500.000	DAU		3 Paket (12 Bln)	2.625.000
2.09.01.2.06. 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	KETPAN	1 Paket (12 Bln)	9.000.000	DAU		1 Paket (12 Bln)	10.000.000



2.09.01.2.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	KETPAN		4.000.000	DAU		1 Paket (12 Bln)	5.000.000
2.09.01.2.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	KETPAN			DAU		1 Dok	5.000.000
2.09.01.2.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	KETPAN	1 Lap	4.689.400	DAU		1 Lap	12.000.000
2.09.01.2.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	KETPAN	25 Lap	68.209.600	DAU		31 Lap	185.665.200
2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang	KETPAN	100%	82.834.700	DAU		100%	124.829.000
2.09.01.2.08. 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	KETPAN	1 Lap	34.920.000	DAU		2 Lap	58.200.000
2.09.01.2.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	KETPAN	12 Lap	34.980.000	DAU		12 Lap	36.729.000
2.09.01.2.08. 03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	KETPAN	1 Lap	1.294.700	DAU		1 Lap	10.500.000



2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	KETPAN	1 Lap	11.640.000	DAU		1 Lap	19.400.000
2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Jumlah Barang Milik Daerah	KETPAN	100%	103.261.600	DAU		100%	104.524.680
2.09.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	KETPAN	1 Unit/12 bln	78.000.000	DAU		1 Unit/12 bln	78.000.000
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	KETPAN	Unit/12 bln	25.261.600	DAU		Unit/12 bln	26.524.680
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Unit		DAU			
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa Berkategori Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	KETPAN	32,7%	25.000.000	DAU		33,2%	285.000.000
2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah	Cakupan Infrastruktur Pergudangan dan Sarana Pendukung lainnya untuk Penyimpanan Cadangan Pangan Kewenangan Daerah	KETPAN	100%	25.000.000	DAU		100%	285.000.000
2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	KETPAN	1 Unit	25.000.000	DAU			25.000.000



2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	KETPAN			DAU		1 Laporan	10.000.000
2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan yang Tersedia	KETPAN			DAU		2 unit	250.000.000
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Desa Berkategori Cukup/Tahan/Sangat Tahan Terhadap Kerawanan Pangan	KETPAN	74,4%	201.555.452	DAU		74,4%	269.175.000
2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Tersedianya dan Tersalurkannya Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	KETPAN	100%	56.000.000	DAU		100%	88.075.000
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan	KETPAN	1 Dokumen	10.000.000	DAU		1 Dokumen	15.000.000
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	KETPAN	1 Laporan	36.000.000	DAU		1 Laporan	37.800.000
2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, dan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	KETPAN	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	5.250.000
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	KETPAN	1 Laporan	5.000.000	DAU		1 Laporan	5.250.000



2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	KETPAN			DAU		1 Unit	8.400.000
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Dikembangkan	KETPAN			DAU		1 Unit	7.875.000
2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	KETPAN			DAU		10 Keluarga	8.500.000
2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Beras Kabupaten	KETPAN	100%	61.000.000	DAU		100%	80.550.000
2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	KETPAN	5 Ton	5.000.000	DAU		5 Ton	6.000.000
2.09.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	KETPAN	1 Dokumen	5.000.000	DAU		1 Dokumen	5.250.000
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	KETPAN	5 Ton	51.000.000	DAU		5 Ton	53.550.000
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/ kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang Terpelihara	KETPAN			DAU		5 Ton	15.750.000



2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi/ Pusat	Tersedianya Harga Referensi Daerah untuk Pangan Lokal	KETPAN	100%	4.055.452	DAU		100%	6.300.000
2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	KETPAN	1 Laporan	4.055.452	DAU		1 Laporan	6.300.000
2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Cakupan Pencapaian target konsumsi pangan sesuai dengan angka kecukupan gizi	KETPAN	100%	80.500.000	DAU		100%	94.250.000
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Skor PPH Tingkat Konsumsi)	KETPAN	1 Dokumen	25.000.000	DAU		1 Dokumen	26.250.000
2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	KETPAN	1 Laporan	50.000.000	DAU		1 Laporan	60.000.000
2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	KETPAN	1 Laporan	5.500.000	DAU		1 Laporan	8.000.000
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa berkategori Rentan Kerawanan Pangan yang Tertangani	KETPAN	100%	99.260.000	DAU		100%	116.614.000
2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kewenangan Kabupaten	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	KETPAN	1 Dok	45.000.000	DAU		1 Dok	55.000.000



2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	KETPAN	1 Dok	45.000.000	DAU		1 Dok	55.000.000
2.09.04. 202	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Desa Rawan Pangan yang Tertangani	KETPAN	100%	54.260.000	DAU		100%	61.614.000
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	KETPAN	1 Laporan	8.000.000	DAU		1 Laporan	8.400.000
2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	KETPAN	1 Laporan	46.260.000	DAU		1 Laporan	53.214.000
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase keterlaksanaan pengawasan keamanan pangan	KETPAN	100%	80.876.000	DAU		100%	120.890.300
2.09.05.201	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengawasan Keamanan Pangan (Persentase terhadap Rencana Tahun Berkenaan)	KETPAN	86%	80.876.000	DAU		86%	120.890.300
2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Dokumen Kelembagaan Pengawas Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Segar asal tumbuhan yang Dibina	KETPAN	1 Dokumen		DAU		1 Dokumen	36.000.000
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi Keamanan an mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	KETPAN	2 Laporan	16.790.000	DAU		1 Laporan	17.600.000



2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KETPAN	2 Dokumen	11.280.000	DAU		2 Dokumen	11.844.000
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Wilayah Kecamatan	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KETPAN	2 Dokumen	11.280.000	DAU		2 Dokumen	11.844.000
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	KETPAN	1 Dokumen	41.526.000	DAU		1 Dokumen	43.602.300
JUMLAH TOTAL					3.337.825.383				4.184.184.447

Tobelo, 27 Juni 2023

Mengetahui

KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN,


DINAS
KETAHANAN PANGAN
ADITAMA ABAS, SP
PEMBINA TK.I/ IVb
NIP. 196710092006041007



PENUTUP

Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 di Lingkup Dinas Ketahanan Pangan, guna mendukung tercapainya target pembangunan daerah tahun 2024 yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2024.

Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 masih mengacu kepada Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2021-2026 dan Musrenbang Tahun 2023, yang telah memuat hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Dinas Ketahanan Pangan selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan Perangkat Daerah

Optimalisasi dalam pelaksanaan isi Renja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan urusan Dinas Ketahanan Pangan yang diemban oleh Dinas Ketahanan Pangan.

Semoga Renja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2024. Akhirnya, ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini

Tobelo, Maret 2024

**KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN,**


ADITAMA ABAS, SP
PEMBINA TK.I/ IVb
NIP. 196710092006041007